PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SEKTOR PERTANIAN DI DESA KALIPITU KECAMATAN TOBELO TENGAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

FESIANINDI MANDARASI

JOORIE M. RURU

NOVVA N. PLANGITEN

Abstract:*The fundamental problem faced by the Farmers is the lack of interference from the Government in empowering the Kalipitu Village Community. Viewed from an economic perspective, the Local Potential in the Village of Kalipitu constitutes the majority of Agriculture or crops, (nutmeg wija) such as tomatoes, vegetable onions and corn. But the big question is, with so many plants in the Kalipitu Village it cannot empower the Community in the economic field, with this the Community is helpless and it turns out that the Kalipitu Village Community only stands alone without any assistance, protection, and strength for the advanced farmer Community to develop in technology agriculture, the lack of the Government's role in the welfare of the Peasant Community in Kalipitu Village. this is seen from the lack of counseling, socialization and assistance from the Government in developing the existing potential in the Kalipitu Village, there is no action so that the community stops operating in farmer groups. The purpose of this study was to determine the empowerment of Kali Pitu Village Community in Central Tobelo District, North Halmahera Regency. This study uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques used are observation, interviews and data collection with documents. To see how the Community Empowerment of Kali Pitu Village in the Agriculture sector in the District of Tobelo Tengah, North Halmahera Regency, Village Communities. Based on the results of research conducted on Kalipitu Village Community Empowerment in the agricultural sector in Central Tobelo District, North Halmahera district, there has been no progress in terms of increasing the economic income of the Village Community or in terms of empowering. This is due to the lack of understanding and the lack of role of the Regional and Village Governments in paying attention to the Kalipitu Village Community. The suggestion is that there is a need for full attention from the Regional Government (Agriculture Office) and more specifically the Village Government in paying attention to the Kalipitu Village Community, in order to build coordination with the local Government.***

Keywords: Empowerment, Communities, Economic Development.

PENDAHULUAN

Salah satu tugas utama di bentuknya suatu Negara adalah meningkatkan kesejahteraan Warga Negara dapat diwujudkan melalui pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian tidak hanya mengejar pertumbuhan namun juga perlu memperhatikan aspek lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan. Pembangunan pertanian yang hanya mengejar pertumbuhan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan berdampak kurang baik bagi lingkungan dan bagi keberlangsungan kehidupan Masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 Pemberdayaan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan Sumber Daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Desa.

Pasal 2 penyelanggaraan Pemerintah Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa,dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik dan Bhineka Tunggal Ika.

Di tentukan oleh Sumber Daya Manusia. Apabila Sumber Daya Manusia Memiliki motivasi tinggi, kreativitas dan mampu mengembangkan inovasi, maka Pembangunan pertanian dapat di pastikan semakin baik. Oleh karena itu diupayakan Pemberdayaan *(empowerment)* artinya suatu peningkatan ke-mampuan yang sesunggunya potensinya ada. Di mulai dari status kurang berdaya menjadi lebih berdaya,sehingga lebih bertanggung jawab. Pembangunan pertanian merupakan pencerminan untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia secara Adil dan Merata, serta mengembangkan kehidupan Masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan Demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termaksud terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan.

Desa Kalipitu memiliki Sumber Daya yang dapat menerapkan Pembangunan pertanian berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan utama dari Pembangunan Pertanian yang di laksanakan oleh Pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakatnya.beragam usaha dari berbagai sektor terus di kembangkan dalam usaha pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteran dan kemakmuran. Dengan kata lain kemitraan dengan Masyarakat dalam mengelolah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

Memberdayakan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Keberhasilanan Pembangunan Masyarakat di tentukan juga dari partisipasi Masyarakat serta peranan Pemerintah.

Salah satu faktor pengukur Kesejahteraan Masyarakat dapat di lihat dari segi ekonomi,dimana semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kesejhateraannya, akan tetapi disisi lain Peran Pemerintah Daerah juga di pertanyakan karena banyak Desa di Kabupaten Halmahera Utara kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak menyentuh langsung dalam kehidupan Masyarakat.karena kegiatan yang seharusnya dilakukan di tingkat Desa, tidak dilakukan Oleh Pemeritah secara baik. Akan tetapi Anggaran yang digunakan di ambil dari Dana Desa. Sehingga mengimbas pada kerugian ditingkat Masyarakat.

pemeretaan ekonomilah, yang menjadi penyebab utama dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kalipitu Kecamatan Tobelo Tengah di Kabupaten Halmahera Utara. Sesuai dengan amana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 dan Pasal 2 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Maka dari itu Pemerintah wajib untuk melakukan atau menfasilitasi kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Desa melaluai anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDES), Untuk Memperdayakan Masyarakat yang profesinya sebagai petani dan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam untuk di tanami jenis tanaman.

Permasalahan mendasar yang di hadapi Masyarakat Tani yaitu kurangnya campur tangan dari Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Kalipitu. Dilihat dari segi ekonomi,Potensi Lokal yang ada di Desa Kalipitu merupakan mayoritas Pertanian atau tanaman,(pala wija) seperti tomat, bawang sayur dan jagung. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, dengan sekian banyak tanaman di Desa Kalipitu tidak dapat Memberdayakan Masyarakat dalam bidang ekonomi,dengan hal itulah Masyarakat tidak berdaya dan ternyata Masyarakat Desa Kalipitu hanya berdiri sendiri tanpa adanya pendampingan, perlindungan, serta kekuatan untuk Masyarakat tani maju berkembang dalam teknologi pertanian, kurangnya Peran Pemerintah akan kesejahteraan Masyarakat Petani di Desa Kalipitu. hal inilah yang dilihat dari tidak adanya penyeluhan,sosialisasi dan pendampingan dari Pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Kalipitu tidak adanya tindakan sehingga

Masyarakat berhenti dalam beroperasi dalam berkelompok tani. Akhirnya respon yang tidak baik Nampak dari Masyarakat kepada Pemerintah. Masyarakat sangat menyayangkan potensi-potensi yang di abaikan oleh Pemerintah sehingga berimbas pada kurangnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan atau program dari Pemerintah, dikarenakan sikap yang terlalu cuek dengan keberadaan Masyarakat tani oleh Pemerinta. kurangnya Peran Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian). Dalam memberikan bantuan baik berupa sarana dan prasarana,anggaran maupun penyuluhan.Kurangnya Sosialisasi dan prkatek teknologi

inilah yang menyebabkan Masyarakat Petani sulit dalam melakukan kegiatan pertanian. Untuk meningkatkan potensi para petani harus melalui motivasi dan dorongan dari Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian) agar Masyarakat tani mampu untuk mengelolah kegiatan pertanian.

Tinjuan pustaka

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah Konsep berasal dari Bahasa Latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol.

Emopowerment artinya adalah suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada. Dimulai status kurang berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga lebih bertanggung jawab. Karena empowerment asalny adari Kata *"Power"* yang artinya" *control,anuhority,dominion*". Awalan "*emp"* artinya "*on put to"* atau *"to cover with"* jelasnya "*moer power"* jadi empowering artinta *"is passing on aunthority and responsibility"* yaitu *attention:* lebih berdaya dari sebelum dalam arti wewenang dan tanggung jawabnya termasuk kemampuan individual yang dimilikinya,Menurut (Sedarmayanti 2008).

Menurut Shallow (dalam Adi,Isbandi Rukminto 2008). Pengertian Pemberdayaan, pada intinya membahas individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan dengan keinginan mereka.

Secara konseptual Pemberdayaan atau Pemberkuasaan (e*mpowerment*), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di Masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan-penguatan modal sosial. Apabila kita sudah memilikiki kepercayaan patuh aturan dan jaringan modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur Masyarakat serta mudah mentransfer knowledge kepada Masyarakat.

Dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan dapat menguatkan knowledge modal (*money*) dan people ,konsep ini mengandung arti bahwa konsep Pemberdayaan Masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin *suistainable* didalam membangun rasa kepercayaan di dalam Masyarakat khususnya anggota kelompok. Oleh karena itu ide utama Pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya Pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan,bebas dari

kebodohan,bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber berproduktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatanya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan,dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka Menurut (dalam Edi Suharto 2010:25).

Undang-undang Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang di gunakan dalam pembangunan Masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian kehidupan Masyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 1,ayat (8). Inti pengrtian Pemberdayaan Masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Masyarakat. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pasal 5, ayat (2)Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut Abu Huraerah (Djohar,2014:62) Mengetakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *comunity self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini Masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi,dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

2. Konsep Masyarakat

Menurut (dalam Alvin L, Betrand: 2000:22) Masyarakat yang dikaji dalam penelitian ini dimaksut untuk mendapat pengertian dan pemahaman secara mendalam tentang pola tingkahlaku kehidupan Masyarakat dalam suatu komunitas, kesatuan kolektif, dalam hal ini agar dapat memberi penjelasan lebih ditel atau terperinci dalam konsep Masyarakat di Desa Kalipitu.

Masyarakat adalah merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri warga kelompok Manusia atau suku yang berbeda satu satu dengan yang lainya. Di dalam suatu Masyarakat itu juga warga bersangkutan untuk mengembangkan serta melestarikan Kebudayaan-kebudayaan yang berasa di dalam lapisan Masyarakat tertentu pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu kelompok Masyarakat dapat menampilkan suatu corak yang khas terutama terlihat oleh orang luar yang bukan warga Masyarakat yang bersangkutan. Seorang warga dari suatu kebudayaan yang telah hidup dari hari ke hari di dalam lingkungan kebudayaan biasanya tidak terlihat corak yang khas itu.

Masyarakat adalah sekelompok individu yang bertempat tinggal dalam suatu Daerah tertentu serta dapat berinteraksi dengan individu lain-nya dalam kurun waktu yng cukup lama. Suatu kelompok orang yang sama identifikasinya, teratur sedemikian rupa di dalam menjalankan segala sesuatu yang di perlukan bagi kehidupan bersama secara harmonis.

Masyarakat disimpulkan bahwa Masyarakat bukan sekedar kumpulan Manusia semata-mata tampa ikatan, akan tetapi terdapat hubungan fungsional antara satu dengan yang lain setiap individu mempunyai kesadaran akan keberadaannya di tengah-tengah individu lainya.sehingga sistem pergaulan yang membentuk kepribadian dari setiap individu yang disadarkan atas kebiasaan atau lembaga Kemasyarakatan yang hidup dalam Masyarakat tertentu.

3. Konsep Pertanian

Istilah umum ’’pertanian” berarti kegiatan menanami tanah dengan tanaman yang nantinya menghasilkan sesuatu yang dapat di panen, dan kegiatan pertanian

merupakan campur tangan Manusia terhadap tetumbuhan asli dan daur hidupnya. Dalam pertanian modern campur tangan ini semakin jauh dalam bentuk masukan bahan kimia pertanian, termasuk pupuk kimia, pestisida dan bahan pembenah tanah lainnya. Banyak pakar pertanian dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional berusaha mengembangkan pertanian alternatif yang bertujuan untuk merehabilitasi kondisi tanah yang sedang sakit. Salah satu usaha meningkatkan kesehatan tanah adalah membangun kesuburan tanah yang di laksanakan dengan cara meningkat kandungan bahan organik melalui kearifan tradisional, atau menggunakan masukan dari dalam usaha tani (*on-farm inpust*) itu sendiri. (dalam Rachman Susanto, 2002:19)

Menurut pakar ekologi, pertanin merupakan suatu kegiatan yang berdasarkan pada pertimbangan fisik, dan ekonomi dianggap berhasil menanggulangi kerawanan pangan, tetapi ternyata harus di bayar mahal dengan makin meningkatnya kerusakan degradasi yang terjadi di permukaan bumi seperti desertifikasi kerusakan hutan penurunan keragaman hayati salinitas penurunan kesuburan tanah, pelonggokan (*acumulation*) senyawa kimia di dalam tanah aupun perairan, erosi dan kerusakan lainnya. Sampai saat ini masih merupakan Dilema berkepanjangan antara usaha pelestarian lingkungan yang berusaha mengendalikan atau membatasi penggunaan bahan-bahan tersebut Menurut Sutanto.(dalam Rachman Sutanto, 2002:22).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan data yang dikumpulkan berisi kutipan-kutipan dan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut(Meleong, 2001). Penelitian Kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.Penelitian kualitatif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu melakukan pengujian hipotesis (Arikunto,2000).

Alasan penggunaan metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini berusaha mengkaji tentang sejauh mana peran Pemerintah dalam Memberdayaan Masyarakat Desa Kalipitu dalam sektor pertanian di kabupaten halmahera utara yang terbatas pada upaya mengambarkan atau mendeskripsikan keadaan atau kondisi pelayanan yang di uraikan secara deskriptif. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang bersifat deskriptif yang menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselediki sebagaimana adanya, yang diikuti dengan interprestasi secara rasional temuan di lapangan sekaligus menganalisis secara sistematis dan kritis. Bertolak dari uraian tersebut maka peneliti memilih pendekatan melalui survei wawancara secara langsung dan observasi dengan pemberi informasi yang diperlukan.

Fokus dalam peneletian ini menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Djohar 2014 yaitu :

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklm yang memungkinkan potensi Masyarakat berkembang. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong *(encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran *(awareness*)akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki Oleh Masyarakat.
2. *Protecting*,yaitu melindungi kepentigan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi Masyarakat yang menjadi subyek pengembangan.

Berdasarkan dengan judul penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Sektor Pertanian,maka menjadi indikator penelitian adalah mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT (Nomor 22

Tahun 2016 pasal 7). tentang bidang pemberdayaan masyarakat, maka Penelitian ini difokuskan pada Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Kalipitu dalam Sektor Pertanian di Kabupaten Halmahera Utara.

Pemelihan informan dilakukan oleh peneliti dengan kata lain informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pertanian : 2 Orang
b. Pemberdayaan Masyarakat desa : 1 Orang
c. Ketua BPD : 1 Orang
d. Sekertaris : 1 Orang
e. Ketua Kelompok Tani : 1 Orang
f. Masyarakat Tani : 1 Orang

Hasil Penelitian

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap Masyarakat Tani yang ada di Desa Kalipitu untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap Masyarakat Tani merupakan sebuah pelajaran yang bertujuan agar Masyarakat Tani yang ada di Desa Kalipitu mampu mengelolah pertanian menjadi lebih baik serta meningkatkan kemampuan ekonomi Masyarakat Tani.

Selain itu juga di Desa Kalipitu ada kelompok pertanian yang di bentuk oleh Masyarakat Desa Kalipitu melalui Dinas Pertanian.

Kelompok Tani merupakan salah satu lembaga yang aktif yang di harapkan oleh Pemerintah pusat untuk selalu siap dalam membantu petani dalam pengolahan pertanian yang di mana akan berdampak baik bagi para petani dalam hal peningkatan pendapatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat yang ada di Desa Kalipitu.

Kelompok tani yang ada di Desa Kalipitu memang tidak terlalu sulit untuk menerima dan menerapkan inovasi-inovasi baru dalam cara pengolahan pertanian yang dapat menguntungkan Masyarakat setempat. Karena dengan adanya kelompok tani membuat Masyarakat bisa saling bertukar informasi dan berbagi pengalaman dalam hal pengolahan pertanian sehingga membuat kelompok tani tidak sulit dalam menerima hal-hal baru dalam pertanian.

Akan tetapi kegiatan kelompok tani tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh Masyarakat setempat, hal ini di sebabkan karena kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian) yang hanya sekedar memberikan penyuluhan berupa bantuan-bantuan tetapi tidak ada pendampingan dan pengawasan di kegiatan selanjutnya. Hal ini juga di dorong oleh hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Bapak Rafles Mataputu, selaku ketua kelompok tani di Desa Kalipitu, yang menjelaskan bahwa minimnya campur tangan dari Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian) yang menyebabkan kegiatan kelompok pertanian di Desa Kalipitu tidak berjalan dengan baik (mandet). Kelemahan-kelemahan itu terletak pada kurangnya sosialisasi, pendampingan dan pengawasan sehingga setiap bantuan yang di berikan tidak dapat di manfaatkan oleh Masyarakat petani karena tidak mengerti bagaimana cara pengolahannya hal ini di sebabkan karena latar belakang pendidikan yang tidak memadai.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu program Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat, Daerah maupun Desa dalam memanfaatkan semua Sumber Daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan Desa. Sasaran dalam program Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari Pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi Masyarakat, teknologi, dan pendidikan. Untuk

itulah berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam sektor Pertanian di Desa Kalipitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara di kaji mulai dari Pemerintahan (Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa), kelembagaan, kesehatan, ekonomi Masyaraka, teknologi dan pendidkan.

1. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pemerintahan
   a. Pemerintahan Desa
      Pemberdayaan masyarakat di bidang Pemerintahan Desa mencakup semua Sumber Daya yang ada di Pemerintahan Desa Kalipitu seperti Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD. Bentuk dari Pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program Desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program Desa, dan peningkatan kualitas kinerja di Pemerintahan Desa. Dengan adanya program Pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dipemerintahan Desa dalam membangun serta memajukan Masyarakat Desa Kalipitu yang lebih maju dan mandiri.
   b. Pemerintah Daerah / Kabupaten
      Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuaan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk menangani Desa di bawah naungan Menteri yaitu; melakukan penyelenggaraan Pemerintah sangat menyayangkan pelaksanaan pembangunan Desa pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kelembagaan
   Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kelembagaan mencakup semua lembaga Kemasyarakat yang ada di Desa Kalipitu. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program Pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program Pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu Pemerintah Desa Kalipitu dalam menjalankan roda pembangunan.
3. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi
   Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang ekonomi merupakan program Pemerintah Desa Kalipitu untuk meningkatkan perekonomian Desa. Program ini mencakup dua item yaitu:

a. Sarana dan pra sarana
   Usaha dalam bidang pertanian tidak akan berjalan dengan baik jika tidak di dukung oleh sarana dan pra sarana yang cukup. ternyata berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, bahwa Masyarakat Desa Kalipitu memiliki berbagai jenis tanaman pala wija seperti tomat, cabai, sayur mayor dan jagung manis. Selain itu juga Masyarakat Desa Kalipitu juga memiliki potensi lokal seperti kelapa. Dari pengamatan dan wawancara dengan beberapa narasumber, ternyata masih kurangnya carmpur tangan Pemerintah

Daerah terhadap kegiatan Pertanian yang ada di Desa Kalipitu. Selain itu juga ada program-program Pemerintah Desa Kalipitu dalam bidang ekonomi seperti pengadaan bibit, pupuk, obat dan mesin tractor. Program Pemerintah Desa ini di rancang pada musrembang Desa yang di laksanakan di Desa Kalipitu pada tahun 2019. Dengan adanya program ini di harapkan dapat Memberdayaan Masyarakat Desa Kalipitu di bidang ekonomi (pertanian) ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan Masyarakat Desa Kalipitu. Selain itu juga ada program pemerintah Desa Kalipitu dalam bidang pendidikan, yaitu dengan di bangunnya sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kalipitu guna memnuhi kebutuhan Masyarakat dalam sector pendidikan.

b. Permodalan

Modal merupakan salah satu factor dalam pengelolahan pertanian. Modal merupakan salah satu kendala kelompok Tani yang ada di Desa kali pitu dalam melaksanakan kegiatan pertanian. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, bahwa minimya permodalan yang di miliki oleh kelompok tani Desa Kalipitu. Hal ini juga di sampaikan langsung oleh kepala bidang TPH Dinas pertanian bahwa untuk Halmahera Utara ketersediaan anggaran yang kurang sehingga dalam melakukan pemerataan kegiatan program pertanian khususnya permodalan masih berkurang sehingga kegiatan di Desa Kalipitu belum maksimal. Akan tetapi di tahun 2019 Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian) akan berupaya berkordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan anggaran-anggaran yang masih kurang.

4. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Teknologi

Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang teknologi merupakan program Pemerintah Desa Kalipitu dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program Pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan Masyarakat. Hal ini di buktikan dengan adanya program Pemerintah Desa yang memberikan sarana dan pra sarana terkait dengan kegiatan pertanian seperti melakukan pengadaan berbagai macam bibit tanaman pala wija, pupuk, obat dan alat mesin tractor. dengan adanya Pemberdayaan Masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing Masyarakat, meningkatkan pegetahuan Masyarakat dan memudahkan Masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan Masyarakat Desa Kalipitu untuk berbagi dan mendapatkan informasi.

5. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah pusat yang di dukung oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan Masyarakat. Bentuk program Pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun Desa siaga yaitu dengan di bangunnya puskemas di Desa Kalipitu dengan tenaga medisnya satu bidan, dua orang perawat dan satu orang mantri. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan Masyarakat Desa Kalipitu akan pentingnya hidup sehat.

6. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pendidikan

Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang pendidikan merupakan program Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendidikan Masyarakat Desa Kalipitu agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari Pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun

juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya Seperti lembaga pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok tani. Bentuk dari Pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan manajemen usaha tani, pengembangan sarana dan pra sarana usaha tani kecil dan pembinaan kelompok tani. Selain itu juga ada program Pemerintah Desa dalam bidang pendidikan formal yaitu di bangunnya sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memnuhi kebutuhan Masyarakat Desa Kalipitu dalam bidang pendidikan. Dengan adanya program Pemberdayaan Masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan Masyarakat Desa Kalipitu serta menciptakan Masyarakat Desa yang berkualitas dan meningktakan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Kalipitu.

PENUTUP

Kesimpulan

Bedasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang di lakukan tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalipitu dalam sektor Pertanian Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, belum mengalami kemajuan. yang dapat di simpulkan bahwa Masyarakat Desa Kalipitu belum dapat di berdayakan melalui sektor pertanian. Hal ini dapat di lihat dari :

1. Upaya penyediaan sarana dan pra sarana dan peningkatan taraf pendidikan, yaitu di mana pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam pengelolaan kegiatan pertanian. Petani yang memiliki taraf pendidikan rendah akan kurang berpartisipasi, hal inilah yang menjadi penyebab bagi petani dalam mengolah kegiatan pertanian di Desa Kalipitu.
2. Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian) dalam hal ini tidak memiliki strategi untuk Memberdayakan Masyarakat tani,Masyarakat tani berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan,perlindungan,serta kekuatan untuk Masyarakat tani maju berkembang dalam teknologi pertanian. Kurangnya peran Pemerintah Akan kesejahteraan Mayarakat Petani di Desa Kalipitu ,hal ini dilihat dari tidak adanya penyeluhan,sosialisasi dan pendampingan dari Pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Kailipitu tidak adanya tindakan sehingga Masyarakat tani berhenti dalam beroperasi dalam berkelompok tani. Ahkirnya Respon yang tidak baik Nampak dari Masyarakat Kepada Pemerintah. Mayarakat sangat menyayangkan potensi-potensi yang di abaikan oleh Pemerintah. Sehingga berimbas pada kurangnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan atau program dari Pemerintah dikarenakan sikap yang terlalu cuek dengan keberadaan Mayarakat tani oleh Pemerintah.
3. Kurangnya Peran Pemerintah Daerah (Dinas pertanian) dalam memberikan bantuan baik berupa sarana pra sarana, anggaran maupun penyuluhan.
   Kurangnya sosialisasi dan praktek teknologi tepat guna (TTG) inilah yang menyebabkan Msyarakat petani sulit dalam melakukan kegiatan pertanian. dapat meningkatkan potensi para petani harus melalui motivasi dan dorongan dari Pemerintah Daerah (Dinas pertanian) agar Masyarakat tani mampu untuk mengolah kegiatan pertaniannya.

Saran

Ada pun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut.

1. Pemerintah (Dinas Pertanian) untuk lebih memperhatikan Masyarakat petani dalam Upaya penyediaan sarana dan prasarana dalam peningkatan taraf pendidikan Masyarakat.
2. Dinas pertanian agar dapat memberikan motivasi dan dorongan berupa

sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta lebih memperbanyak kegiatan penyuluhan.

3. Pemerintah Dinas Pertanian adakan media pendidikan Formal maupun non Formal bagi Masyarakat petani melalui pergerakan kreativitas kelompok tani yang sempat terhenti, sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi jembatan bagi Pemerintah juga memberikan pembinaan dan bimbingan yang konsisten, berkelanjutan serta tepat sasaran kepada Masyarakat dengan selalu melibatkan Masyarakat yakni supaya bantuan tersebut efektif karena dengan kehendak dan *(empowering)* Masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Dalam kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alvin L, Betrand. 2000. *Sosiologi.* Terjemahan. Sanapiah S.F. Jakarta: Penerbit CV.

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Rajawali.

Djhohar. 2014. *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Lexi, J Moleong. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung.PT. Persada Rosa Karya.

Rachman, Sutanto. 2002. *Pertanian Organik.* Yokyakarta*:* Kansius (IKAPI).

Sedarmayanti,2008.Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta: Grasindo

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial.* Bandung: PT Aditama.

Sumber-sumber Lain

Undang-Undang Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 pasal 7 tentang Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

PERMENDAGRI RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.